#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program
Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam Upaya Penanggulangan Masalah
Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

## 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan Sasaran Kebijakan dalam Implementasi program BST di Kota Mataram bisa dibilang sudah cukup efektif. Dan dari aspek prosedural telah telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, meskipun secara nominal dana bantuan tersebut tak sepenuhnya mampu membendung kebutuhan mereka dalam sebulan.

Meski demikian, Implementasi Program BST di Kota Mataram telah berjalan 10 (sepuluh) kali tahap pencairan. Hal tersebut merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian dari pada standar dan sasarn kebijakan, yang dimulai pada bulan April 2020 hingga Januari 2021. Tahap awal pencairannya, Program Bantuan Sosial Tunai pada 3 (tiga) bulan pertama yakni April, Mei dan Juni, masing-masing KK (kepala keluarga) mendapatkan bantuan sebesar 600.000 perkepala keluarga. Kemudian disusul oleh bulan-bulan berikutnya Kelurga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan dana bantuan masing-masing sebesar 300.000 per KK (kepala keluarga) satu kali dalam sebulan.

#### 2. Dukungan Lingkungan Sosial Politik

Dari aspek lingkungan (Ekonomi, Sosial dan Politik), implementasi program BSTmasih terdapat polemik terutama pada persoalan data KPM yang masih ditemukan data ganda. Hal menjadikan implementasi program BST tidak efektif dan berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu, beberapa kelompok kepentingan dan kelompok penekan melakukan kritik terhadap data-data KPM yang dipake dalam penyaluran dana program BST tersebut.

#### 5.2 Saran

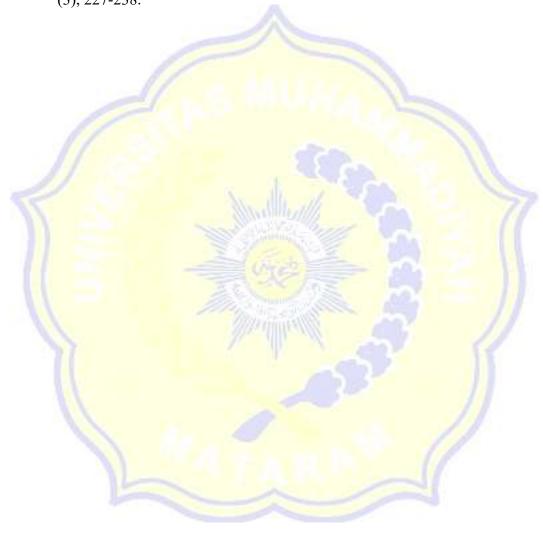
- 1. Diharapkan kepada pihak kelurahan dan Dinas Sosial Kota Mataram untuk lebih dalam hal menentukan dan menetapkan data yang berkenaan dengan masyarakat, supaya tidak terjadi kekeliruan ketika penentuan calon-calon yang berhak dan layak menerima bantuan atau lainnya dari pemerintah sendiri.
- 2. Diharapkan kedepannya, pemerintah terkait bisa membuat suatu standar kebijakan, sebagai penunjang dalam hal untuk mengontrol supaya terjadi kerancuan atau tumpang tindih baik dari dalam proses pendataan maupun dalam proses penyaluran bantuan tersebut.
- 3. Untuk KPM dana Program BST, diharapkan dana bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dan dimanajemen dengan baik, mengingat pandemi Covid-19 memberikan dampak yang negative terhadap aspek kesehatan terutama pada aspek perekonomian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan. Administrasi Publik, 1 (1), 2-11.
- Ali, F., & Alam, A. S. (2016). *Studi kebijakan pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ali, Muhammad. (2006). Kebijakan publik. Yogyakarta: Genta press.
- Aneta, A. (2010). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Administrasi Publik, 1* (1), 55-65.
- Harsono, I. (2020, September Minggu). *Ntb di ambang resesi ekonomi*. Dipetik November Rabu, 2020, dari Lombokpost: https://lombokpost.jawapos.com/ntb/06/09/2020/ntb-diambang-resesi-ekonomi/
- Marliya. (2013). Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Palu. *Katalogis*, 1 (2), 77-86.
- Meter, V., & Horn, V. (1975). The policy implementation process. *Administration & Society*, 6 (4), 445-488.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nirkomala. (2020, November Jum'at). *Pasien Covid-19 di Mataram bertambah 10 orang*. Dipetik Desember Minggu, 2020, dari Antaranews.com: https://www.antaranews.com/berita/1850500/pasien-covid-19-di-matarambertambah-10-orang.
- Nurislaminingsih, R. (2020). Layanan pengetahuan tentang Covid-19 di lembaga informasi. *Ilmu perpustakaan dan informasi*, 4 (1), 20-37.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam masa pandemi Corona Virus 2019 oleh pemerintah sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative & Governance*, 3 (2), 240-249.
- Setiwan, K. (2020, April Sabtu). *Mensos tinjau penyaluran BST bagi 102.727 KK*. Dipetik Desember Selasa, 2020, dari Kemensos.go.id: https://kemensos.go.id/mensos-tinjauan-penyaluran-bst-bagi-102727-kk.
- Sirajuddin, I. A. (2014). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan publik dasar bidang sosial di Kota Makassar. *Administrasi Publik*, 4 (1), 2-14.
- Susilo, A., & dkk. (2020). Coronavirus disease 2019: Tinjauan literatur terkini. *Penyakit dalam indonesia*, 7 (1), 45-67.
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi pembentukan aturan terkait pencegahan Covid-19 di Indonesia. *Pendidikan, Sosial, dan Agama, 12* (1), 59-70.

Witaradya, K. (2010, Januari Jum'at). *Implementasi kebijakan publik model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process*. Dipetik Desember Senin, 2020, dari https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/

Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lockdown sebagai antisipasi penyebaran Corona Virus Covid-19. *Sosial & Budaya Syar-i*, 7 (3), 227-238.







# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK STATUS TERAKREDITASI "B"

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 - 633723

# 思到到期急

Nomor : lb.l./II.3.AU/F/I/2021 Lamp. : Proposal Skrispi Hal : *Mohon Izin Penelitian*  Mataram, 1 Jumadil Akhir 1442 H 14 Januari 2021 M

Kepada Yth : Kepala BAKESBANGPOLDAGRI Kota Mataram

di -

Mataram

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb

Ba'da salam, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, Amin.

Dalam rangka menyelesaikan syarat-syarat untuk mencapai kebulatan studi program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, maka para mahasiswa harus memenuhi Karya Ilmiah (Skripsi), untuk keperluan tersebut kami mohonkan izin bagi mahasiswa berikut:

Nama : Aldi Sajian
 NIM : 217130091
 Jurusan : Sosial

4. Program Studi : Ilmu Pemerintahan5. Tujuan : Untuk Memperoleh Data

6. Tema / Judul : "Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST)

Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid - 19 Di Kota Mataram"

7. Lokasi Penelitian : Kantor Sekretariat Daerah (SETDA) Kota Mataram &

Dinas Sosial Kota Mataram

Demikian atas bantuan dan rekomendasi/izin bagi mahasiswa yang bersangkutan, kami khaturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb



# Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- 1 Rektor UMMAT (untuk maklum);
- 2 Saudara mahasiswa yang bersangkutan;
- 3 Arsip.



